

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI (baru)

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan)
2.	Surat Kuasa memakai kop surat di atas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan)
3.	Fotocopy IUP Eksplorasi
4.	Fotocopy akta pendirian badan usaha dan perubahannya yang maksud dan tujuan usahanya bergerak di bidang usaha pertambangan mineral atau batubara yang disahkan oleh pejabat berwenang
5.	Profil badan usaha dengan melampirkan salinan legalitas SIUP, TDP, surat keterangan Domisili
6.	Fotocopy NPWP
7.	Susunan direksi dan pemegang saham dengan melampirkan KTP dan NPWP dan/atau Fotocopy paspor bagi WNI untuk Badan Usaha
8.	Susunan pengurus untuk koperasi dan firma
9.	Peta wilayah IUP OP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai sistem informasi geografis (GIS) nasional
10.	Laporan eksplorasi yang sudah mendapat pengesahan dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat
11.	Laporan Studi Kelayakan yang sudah mendapat pengesahan dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat
12.	Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca Tambang
13.	Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB)
14.	Dokumen Rencana Pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi
15.	Fotocopy Surat Pengesahan KTT Tahap Eksplorasi
16.	Surat Pernyataan Tenaga Ahli Pertambangan dan/atau Geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun dengan melampirkan daftar riwayat hidup dan fotocopy ijazah
17.	Surat pernyataan bermeterai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan
18.	Izin Lingkungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota terkait
19.	Laporan Keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik
20.	Surat Keterangan Kesesuaian tata ruang dari Pemerintah Kabupaten/Kota terkait
21.	Bukti penguasaan atas lahan yang dimohonkan (fotocopy sertifikat tanah/AJB/Surat perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan/Ijin Ketidakterbatasan dari pemilik lahan/dan sejenisnya)
22.	Peta Batas Kepemilikan tanah yang di-overlay-kan dengan batas IUP OP yang dimohonkan (ditandatangani Pemerintah Desa setempat)
23.	Bukti Pembayaran pajak badan usaha/perorangan tahun terakhir
24.	Bukti pembayaran PBB (pajak Bumi dan bangunan) tahun terakhir
25.	Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir (untuk mineral logam dan batubara)
26.	Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang WIUP yang telah berakhir (untuk mineral logam dan batubara)
27.	Berkas permohonan rangkap 3 (1 asli, 2 fotocopy), disusun sesuai urutan persyaratan dan dimasukkan kedalam Map Clear holder berwarna Hitam